



BANK INDONESIA



REPUBLIK INDONESIA

HUBUNGAN KEMISKINAN DENGAN INFLASI, PEKERJAAN INFORMAL, DAN LAYANAN DASAR

MEMAHAMI KETERKAITAN YANG MEMBENTUK KESEJAHTERAAN
DAN KETAHANAN EKONOMI RAKYAT



KEMISKINAN
Sept 2025
8,25%
23,36 JUTA ORANG

RENTAN MISKIN
24,42%
68,51 JUTAN ORANG

HARGA NAIK
DAYA BELI TURUN

BERAS



INFLASI
MENGGERUS
DAYA BELI

KELUARGA TANGGUH
EKONOMI KUAT
INDONESIA MAJU



PEKERJAAN INFORMAL
RENDAH PRODUKTIVITAS
TINGGI KERENTANAN

**PEKERJAAN
INFORMAL**

PENDAPATAN TIDAK PASTI
PERLINDUNGAN TERBATAS

LAYANAN DASAR: KUNCI MEMUTUS RANTAI KEMISKINAN



PENDIDIKAN
AKSES MERATA,
MASA DEPAN CERAH



KESEHATAN
PERLINDUNGAN TERJANGKAU,
HIDUP LEBIH SEHAT



AIR BERSIH
KEHIDUPAN LAYAK,
PRODUKTIVITAS MENINGKAT



SANITASI
LINGKUNGAN SEHAT,
BEBAS PENYAKIT

DATA AKURAT • KEBIJAKAN TEPAT • SINERGI KUAT • KESEJAHTERAAN MERATA

OLEH

RUDY C TARUMINGKENG

Rudy C Tarumingkeng: Hubungan kemiskinan dengan inflasi, pekerjaan informal, dan layanan dasar

Oleh:

[Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD](#)

Professor of Management NUP: 9903252922

Professor Emeritus, IPB-University

Anggota MPR-RI, 1982-1987

Rektor, Universitas Cenderawasih, Papua (1978-1988, dan

Rektor, Kampus AGRO Manokwari sekarang Universitas Papua Manokwari

Coordinator, CIDA/DIKTI SFU Burnaby BC Canada 1988-1991

Rektor, Universitas Kristen Krida Wacana, Jakarta (1991-2000)

Chairman, Board of Professors, IPB-University, Bogor (2005-2006)

AI - Data Analyst, dan Chairman, Academic Senate, IBM-ASMI, Jakarta 2024-

© RudyCT Academic Series

rudymt75@gmail.com

7 April 2026

HUBUNGAN KEMISKINAN DENGAN INFLASI, PEKERJAAN INFORMAL, DAN LAYANAN DASAR

Abstrak

Makalah ini membahas hubungan antara kemiskinan, inflasi, pekerjaan informal, dan layanan dasar dalam konteks Indonesia. Argumen utama makalah ini adalah bahwa kemiskinan tidak dapat dipahami hanya sebagai rendahnya pendapatan atau pengeluaran, melainkan sebagai hasil dari interaksi beberapa kerentanan yang saling menguatkan. Inflasi menggerus daya beli, terutama bagi rumah tangga miskin dan rentan yang porsi belanja pangannya tinggi. Pekerjaan informal membuat rumah tangga hidup dengan pendapatan yang lebih tidak stabil, perlindungan kerja yang lebih lemah, dan akses jaminan sosial yang lebih terbatas. Sementara itu, keterbatasan layanan dasar—terutama pendidikan, kesehatan, air minum, dan sanitasi—membatasi kemampuan rumah tangga miskin untuk keluar dari jebakan kemiskinan. Dalam kasus Indonesia, persentase penduduk miskin pada September 2025 tercatat 8,25 persen atau 23,36 juta orang; inflasi tahunan sempat naik ke 4,76 persen pada Februari 2026 sebelum turun ke 3,48 persen pada Maret 2026; Tingkat Pengangguran Terbuka November 2025 sebesar 4,74 persen; dan BPS serta World Bank sama-sama menunjukkan bahwa pekerjaan informal masih besar serta berkorelasi dengan kemiskinan yang lebih tinggi. Ketimpangan layanan dasar juga nyata: pada 2025 rata-rata lama sekolah penduduk umur 15 tahun ke atas di kuintil pengeluaran terbawah hanya 7,58 tahun, sedangkan di kuintil tertinggi 11,76 tahun; APK perguruan tinggi kuintil 1 hanya 17,30,

sedangkan kuintil 5 mencapai 55,37; dan akses sanitasi layak pada kuintil 1 sebesar 76,70 persen, jauh di bawah kuintil 5 sebesar 92,08 persen. Temuan ini menunjukkan bahwa kemiskinan di Indonesia bersifat multidimensi dan dinamis. Ia diperburuk oleh inflasi ketika pendapatan riil menurun, dipertahankan oleh dominasi pekerjaan informal yang produktivitasnya rendah, dan diwariskan antargenerasi ketika layanan dasar tidak merata. Karena itu, strategi pengurangan kemiskinan yang efektif harus menggabungkan stabilitas harga, formalisasi dan peningkatan kualitas kerja, serta pemerataan layanan dasar. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Kata kunci: kemiskinan, inflasi, pekerjaan informal, layanan dasar, pendidikan, sanitasi, Indonesia

Hubungan Kemiskinan dengan Inflasi, Pekerjaan Informal, dan Layanan Dasar

Pendahuluan

Kemiskinan adalah salah satu persoalan paling mendasar dalam pembangunan karena ia tidak hanya berkaitan dengan rendahnya pendapatan, tetapi juga dengan kerentanan hidup. Rumah tangga miskin umumnya hidup dekat dengan garis batas: sedikit kenaikan harga, hilangnya pekerjaan, sakit, atau gangguan pendidikan anak dapat segera mendorong mereka ke kondisi yang lebih buruk. Dalam konteks Indonesia, kemiskinan memang terus menurun secara resmi—BPS mencatat persentase penduduk miskin September 2025 sebesar 8,25 persen, turun dari 8,47 persen pada Maret 2025 dan 8,57 persen pada September 2024—tetapi penurunan itu tidak berarti seluruh kerentanan sosial telah hilang. BPS sendiri dalam penjelasan mengenai perbedaan garis kemiskinan Bank

Dunia dan BPS menunjukkan bahwa, pada September 2024, kelompok rentan miskin mencapai 24,42 persen penduduk atau 68,51 juta orang. Artinya, di belakang angka kemiskinan resmi yang menurun, masih terdapat lapisan besar penduduk yang mudah jatuh miskin kembali ketika terkena guncangan. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Salah satu guncangan yang paling cepat dirasakan rumah tangga miskin adalah inflasi. Kenaikan harga pangan, transportasi, listrik, dan kebutuhan harian tidak hanya meningkatkan biaya hidup, tetapi juga menurunkan ruang bernapas ekonomi rumah tangga. Pada awal 2026, inflasi Indonesia bergerak cukup tajam: 3,55 persen pada Januari, 4,76 persen pada Februari, lalu turun ke 3,48 persen pada Maret. Walaupun Bank Indonesia menilai inflasi tetap berada dalam kerangka yang terkendali dan Februari dipengaruhi faktor sementara seperti *low base effect*, pengalaman ini tetap penting karena menunjukkan betapa sensitifnya biaya hidup rumah tangga terhadap perubahan harga. Bagi rumah tangga miskin dan rentan, inflasi bukan sekadar statistik, melainkan perubahan langsung pada isi keranjang belanja mereka. ([Bank Indonesia](#))

Masalahnya menjadi lebih rumit karena banyak rumah tangga miskin bergantung pada pekerjaan informal. World Bank menegaskan bahwa informality di Indonesia masih terkonsentrasi pada pertanian dan jasa berkeahlian rendah dan berasosiasi dengan tingkat kemiskinan yang lebih tinggi di tingkat provinsi. Pada saat yang sama, BPS menunjukkan pasar kerja Indonesia memang membaik—TPT November 2025 turun menjadi 4,74 persen—tetapi perbaikan kuantitas pekerjaan belum otomatis berarti kualitas pekerjaan merata. Banyak orang bekerja, tetapi masih bekerja dalam keadaan rentan, tanpa kepastian pendapatan, tanpa perlindungan kerja memadai, dan dengan produktivitas yang rendah. Dalam situasi seperti itu, inflasi kecil sekalipun dapat menjadi lebih berbahaya karena rumah tangga tidak memiliki bantalan pendapatan yang kuat. ([Open Knowledge Repository](#))

Di atas semua itu, kemiskinan juga berhubungan erat dengan layanan dasar. Pendidikan, kesehatan, air minum layak, sanitasi, dan perlindungan kesehatan bukan sekadar layanan sosial; semuanya adalah fondasi yang menentukan apakah sebuah keluarga dapat keluar dari kemiskinan secara berkelanjutan. BPS pada 2025 menunjukkan kesenjangan yang jelas menurut kuintil pengeluaran: rata-rata lama sekolah penduduk umur 15 tahun ke atas di kuintil terbawah 7,58 tahun, sementara kuintil tertinggi 11,76 tahun; APK perguruan tinggi di kuintil terbawah 17,30, sedangkan kuintil tertinggi 55,37; akses sanitasi layak pada kuintil 1 sebesar 76,70 persen, sedangkan kuintil 5 mencapai 92,08 persen. Data itu memperlihatkan bahwa kemiskinan dan keterbatasan layanan dasar saling memperkuat. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Makalah ini berangkat dari tesis bahwa hubungan kemiskinan dengan inflasi, pekerjaan informal, dan layanan dasar bersifat sirkular. Inflasi memperdalam kerentanan rumah tangga miskin. Pekerjaan informal mempertahankan rendahnya ketahanan ekonomi rumah tangga. Keterbatasan layanan dasar menghambat mobilitas sosial dan produktivitas. Ketiganya kemudian saling berinteraksi dan menghasilkan jebakan kemiskinan yang sulit diputus jika kebijakan hanya bergerak di satu sisi. Oleh karena itu, pembahasan berikut akan menguraikan relasi tersebut secara konseptual dan empiris dalam konteks Indonesia terkini. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Kemiskinan sebagai Kerentanan Multidimensi

Kemiskinan pada dasarnya bukan hanya soal tidak cukup uang, tetapi soal hidup dalam ruang keputusan yang sempit. Rumah tangga miskin biasanya memiliki pilihan yang lebih sedikit: ketika harga naik, mereka tidak punya banyak tabungan untuk menyerap guncangan; ketika sakit, mereka lebih mudah kehilangan pendapatan; ketika anak putus sekolah, mereka lebih sulit memulihkan kualitas sumber daya manusia rumah tangga. Itulah sebabnya pendekatan modern terhadap kemiskinan melihatnya sebagai

kondisi multidimensi yang berkaitan dengan pendapatan, pekerjaan, pendidikan, kesehatan, perumahan, dan akses layanan. Penjelasan BPS mengenai kelompok miskin dan rentan miskin menunjukkan bahwa garis pemisah antara "miskin" dan "tidak miskin" di Indonesia sesungguhnya tipis untuk sebagian besar rumah tangga di lapisan bawah. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Dalam konteks Indonesia, data kemiskinan September 2025 juga menunjukkan bahwa kemiskinan masih lebih tinggi di perdesaan daripada perkotaan. BPS mencatat tingkat kemiskinan perkotaan sebesar 6,60 persen, sementara perdesaan 10,72 persen. Jumlah penduduk miskin di perkotaan 11,18 juta orang dan di perdesaan 12,18 juta orang. Ini menunjukkan bahwa struktur kerentanan tidak seragam. Rumah tangga miskin di kota sangat sensitif pada inflasi sewa, transportasi, dan pangan eceran. Rumah tangga miskin di desa sangat terkait dengan produktivitas pertanian, musim, upah harian, dan akses layanan dasar. Dengan demikian, ketika membahas hubungan kemiskinan dengan inflasi, pekerjaan informal, dan layanan dasar, perbedaan ruang sosial perkotaan dan perdesaan juga harus diperhitungkan. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

World Bank dalam *Poverty & Equity Brief* Oktober 2025 juga mencatat bahwa kemiskinan di Indonesia terus menurun secara bertahap karena pertumbuhan ekonomi yang stabil, tetapi tantangannya adalah memastikan bahwa pertumbuhan tersebut benar-benar menjangkau kelompok bawah dan tidak tersendat oleh lemahnya kualitas pekerjaan. Sementara itu, *Indonesia Economic Prospects* Juni 2025 menekankan bahwa banyak orang Indonesia masih berada dalam pekerjaan berproduktivitas rendah atau informal, dan banyak generasi muda belum memperoleh pekerjaan yang baik. Ini berarti keberhasilan mengurangi kemiskinan tidak cukup diukur dari penurunan persentase penduduk miskin, tetapi juga dari seberapa kuat rumah tangga bawah menghadapi guncangan. ([World Bank](#))

Inflasi dan Kemiskinan: Dari Harga ke Daya Beli

Hubungan antara inflasi dan kemiskinan adalah hubungan yang paling langsung dan paling cepat terlihat. Ketika harga naik, terutama harga pangan dan kebutuhan dasar, rumah tangga miskin mengalami penurunan daya beli lebih tajam daripada rumah tangga kaya. Alasannya sederhana: proporsi belanja makanan, energi rumah tangga, dan transportasi pada keluarga miskin jauh lebih besar. Dalam struktur seperti ini, inflasi 1 persen bukan sekadar kenaikan harga rata-rata, tetapi dapat berarti berkurangnya kualitas makanan, tertundanya belanja sekolah, atau meningkatnya utang harian. ([Bank Indonesia](#))

Perkembangan inflasi Indonesia pada awal 2026 menunjukkan betapa pentingnya isu ini. Data BI mencatat inflasi tahunan sebesar 3,55 persen pada Januari 2026, 4,76 persen pada Februari 2026, lalu turun ke 3,48 persen pada Maret 2026. BI menjelaskan bahwa lonjakan Februari banyak dipengaruhi *low base effect* dan tekanan pada kelompok *administered prices* serta *volatile food*. Namun bagi rumah tangga miskin, perdebatan teknis tentang basis statistik tidak mengubah kenyataan bahwa harga pangan dan biaya hidup sempat terasa lebih berat. Dalam keadaan pendapatan yang tidak elastis, kenaikan biaya hidup semacam itu bisa segera mengurangi kesejahteraan riil. ([Bank Indonesia](#))

BPS juga menunjukkan bahwa kelompok makanan, minuman, dan tembakau tetap menjadi komponen penting dalam pembentukan inflasi. Ini relevan untuk kemiskinan karena konsumsi pangan memiliki bobot tinggi dalam garis kemiskinan. Ketika inflasi pangan meningkat, garis kemiskinan ikut terdorong naik. Rumah tangga yang sebelumnya sedikit di atas garis kemiskinan dapat jatuh ke bawahnya, sementara rumah tangga yang sudah miskin menjadi lebih dalam tingkat kemiskinannya. Dengan kata lain, inflasi tidak hanya menambah jumlah orang miskin secara potensial, tetapi juga memperdalam intensitas kemiskinan. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Di sinilah letak pentingnya melihat inflasi sebagai mekanisme pemindahan risiko. Rumah tangga berpendapatan tinggi mungkin bisa menyesuaikan pola konsumsi tanpa kehilangan kualitas hidup secara berarti. Tetapi rumah tangga miskin tidak memiliki ruang adaptasi sebesar itu. Mereka menanggung inflasi bukan sebagai statistik makro, melainkan sebagai pengurangan kalori, protein, kesehatan, kenyamanan hunian, atau biaya transportasi ke sekolah dan tempat kerja. Oleh karena itu, stabilitas harga adalah salah satu bentuk perlindungan sosial paling mendasar. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

BPS dan BI sama-sama memperlihatkan bahwa inflasi Indonesia pada Maret 2026 telah kembali ke kisaran sasaran. Ini penting dari sisi kebijakan karena menunjukkan bahwa stabilitas makro masih relatif terjaga. Tetapi dari perspektif kemiskinan, pelajaran utamanya adalah bahwa rumah tangga miskin tetap sangat rentan terhadap lonjakan inflasi jangka pendek. Karena kelompok rentan miskin di Indonesia masih besar, sedikit gangguan harga dapat memiliki efek sosial yang jauh lebih besar daripada yang tampak dari angka inflasi agregat. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Pekerjaan Informal dan Reproduksi Kemiskinan

Hubungan kedua yang sangat penting adalah antara kemiskinan dan pekerjaan informal. Secara teoretis, pekerjaan informal tidak selalu identik dengan kemiskinan. Ada usaha mikro informal yang cukup menguntungkan, dan ada pekerja formal yang berupah rendah. Tetapi dalam struktur ekonomi Indonesia, informality tetap sangat erat dengan produktivitas rendah, perlindungan terbatas, dan volatilitas pendapatan. World Bank menekankan bahwa informality di Indonesia terkonsentrasi pada pertanian dan jasa berkeahlian rendah, serta berkorelasi dengan kemiskinan provinsi yang lebih tinggi. Publikasi World Bank 2026 bahkan menyebut informality dan kualitas kerja sebagai salah satu tantangan pembangunan paling penting bagi Indonesia. ([Open Knowledge Repository](#))

BPS menunjukkan bahwa pasar kerja Indonesia membaik dari sisi kuantitas: TPT Agustus 2025 sebesar 4,85 persen dan turun menjadi 4,74 persen pada November 2025. Jumlah penduduk bekerja naik menjadi 147,91 juta orang pada November 2025, dan rata-rata upah buruh sebesar Rp3,33 juta. Namun perbaikan ini tidak boleh dibaca terlalu sederhana sebagai bukti bahwa seluruh masalah kerja telah selesai. Jumlah pekerjaan memang bertambah, tetapi kualitas, produktivitas, stabilitas pendapatan, dan perlindungan kerja tetap menjadi soal besar. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Petunjuk mengenai masalah kualitas itu terlihat dari struktur formalisasi. BPS merilis tabel 2025 tentang persentase tenaga kerja formal menurut jenis kelamin: laki-laki 45,88 persen, perempuan 36,66 persen. Secara implisit ini menunjukkan bahwa mayoritas pekerja perempuan masih berada di kegiatan informal, dan bahkan pada laki-laki pun proporsi informal masih besar. Ketika pekerjaan informal mendominasi, rumah tangga cenderung hidup dengan pendapatan yang tidak stabil, akses pembiayaan yang terbatas, dan hubungan kerja yang lebih rapuh. Dalam kondisi seperti ini, kemiskinan bukan hanya masalah penghasilan rendah, tetapi juga ketiadaan perlindungan terhadap guncangan. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Hubungan antara pekerjaan informal dan kemiskinan terjadi melalui beberapa jalur. Pertama, upah atau pendapatan informal cenderung lebih volatil. Pedagang kecil, buruh harian, pengemudi informal, pekerja rumah tangga, dan pekerja keluarga tidak dibayar sering tidak memiliki penghasilan tetap. Kedua, pekerjaan informal sering tidak disertai jaminan sosial, pesangon, cuti sakit, atau perlindungan kecelakaan kerja. Ketiga, peluang peningkatan keterampilan dan produktivitas di sektor informal cenderung lebih kecil. Akibatnya, rumah tangga yang hidup dari kerja informal lebih mudah kembali miskin ketika terkena sakit, penurunan permintaan, atau inflasi. ([Open Knowledge Repository](#))

World Bank dalam *Indonesia Economic Prospects* Juni 2025 menegaskan bahwa banyak orang Indonesia masih berada dalam pekerjaan berproduktivitas rendah atau informal, dan bahwa pertumbuhan yang lebih cepat dan lebih berkualitas menuntut pergeseran menuju pekerjaan yang lebih baik. Pernyataan ini sangat relevan bagi diskusi kemiskinan. Selama mayoritas pekerjaan tambahan yang tercipta masih berproduktivitas rendah, rumah tangga mungkin keluar dari pengangguran tetapi belum tentu keluar dari kemiskinan atau kerentanan. Dengan kata lain, pertumbuhan kesempatan kerja dan penurunan kemiskinan baru akan lebih kokoh bila pasar kerja bergerak bukan hanya ke arah "lebih banyak kerja", tetapi juga "kerja yang lebih baik". ([Open Knowledge Repository](#))

Layanan Dasar dan Perangkat Kemiskinan

Hubungan ketiga adalah antara kemiskinan dan layanan dasar. Jika inflasi memengaruhi kemampuan rumah tangga bertahan hari ini, maka layanan dasar menentukan kemampuan rumah tangga memperbaiki masa depannya. Pendidikan menentukan kualitas modal manusia. Layanan kesehatan dan perlindungan kesehatan menentukan kemampuan keluarga menghindari guncangan katastrofik. Air minum layak dan sanitasi menentukan kesehatan lingkungan dan produktivitas jangka panjang. Karena itu, keterbatasan layanan dasar adalah mekanisme reproduksi kemiskinan antargenerasi. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Dalam bidang pendidikan, kesenjangan menurut kuintil pengeluaran di Indonesia masih besar. BPS mencatat bahwa pada 2025 rata-rata lama sekolah penduduk umur 15 tahun ke atas pada kuintil 1 hanya 7,58 tahun, sedangkan kuintil 5 mencapai 11,76 tahun. Pada level pendidikan tinggi, kesenjangan bahkan lebih mencolok: APK perguruan tinggi untuk kuintil 1 sebesar 17,30, sedangkan kuintil 5 sebesar 55,37. Kesenjangan semacam ini menunjukkan bahwa kemiskinan bukan sekadar kekurangan konsumsi saat ini; ia juga membatasi akumulasi modal manusia dan mengurangi peluang mobilitas sosial ke depan. Anak dari rumah tangga miskin memasuki pasar

kerja dengan bekal pendidikan yang lebih rendah, lalu lebih mungkin terjebak dalam pekerjaan informal berupah rendah, sehingga lingkaran kemiskinan berulang. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Dalam bidang permukiman dan sanitasi, BPS juga menunjukkan stratifikasi yang jelas. Pada 2025, akses rumah tangga terhadap layanan sanitasi layak pada kuintil 1 sebesar 76,70 persen, sedangkan pada kuintil 5 sebesar 92,08 persen. Artinya, rumah tangga terbawah lebih sering hidup dalam lingkungan yang kualitas sanitasi dan kesehatannya lebih buruk. Ini bukan sekadar isu kenyamanan, tetapi isu penyakit, stunting, hari kerja yang hilang, biaya pengobatan, dan mutu tumbuh kembang anak. Kesenjangan layanan dasar seperti ini memperlihatkan bahwa kemiskinan harus dibaca sebagai kemiskinan lingkungan hidup dan kesehatan, bukan hanya kemiskinan moneter. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Untuk layanan air minum dan kesehatan, BPS juga telah memperbarui tabel nasional 2025 mengenai akses terhadap sumber air minum layak dan kepemilikan jaminan kesehatan/JKN. Fakta bahwa indikator-indikator ini dipantau secara nasional memperlihatkan bahwa negara memandangnya sebagai komponen kesejahteraan inti. Walaupun tidak semua angka rinci mudah ditarik dari ringkasan publik, arah kebijakannya jelas: kemiskinan tak bisa diturunkan secara berkelanjutan bila rumah tangga miskin tetap hidup dengan akses air yang buruk, perlindungan kesehatan yang lemah, dan risiko biaya kesehatan yang tinggi. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

World Bank juga secara konsisten menghubungkan layanan dasar dengan peluang ekonomi. Dalam laporan pendidikan Indonesia, Bank Dunia menekankan bahwa air minum bersih, sanitasi higienis, stimulasi anak usia dini, dan penanganan kerawanan pangan merupakan unsur penting dalam pembentukan modal manusia. Dalam konteks pembangunan, ini berarti rumah tangga miskin tidak cukup hanya diberi transfer pendapatan; mereka juga harus didukung dengan lingkungan dan layanan yang

memungkinkan anak-anak mereka tumbuh sehat, belajar baik, dan memiliki produktivitas yang lebih tinggi saat dewasa. ([World Bank](#))

Interaksi Ketiganya: Lingkaran Kerentanan

Hubungan kemiskinan dengan inflasi, pekerjaan informal, dan layanan dasar tidak bersifat terpisah, melainkan membentuk lingkaran kerentanan. Rumah tangga miskin cenderung bekerja di sektor informal. Karena pekerjaan informal memberi pendapatan yang tidak stabil, mereka memiliki tabungan dan perlindungan yang terbatas. Ketika inflasi naik, terutama pada pangan dan transportasi, pendapatan riil mereka turun lebih cepat. Penurunan daya beli ini kemudian membuat pengeluaran untuk pendidikan, kesehatan, dan kualitas konsumsi rumah tangga makin tertekan. Anak-anak di rumah tangga semacam ini tumbuh dalam lingkungan yang kurang mendukung, berisiko memiliki hasil belajar dan kesehatan yang lebih rendah, lalu saat dewasa lebih mungkin kembali masuk ke pekerjaan informal. Siklus pun berulang. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Siklus ini juga menjelaskan mengapa kemiskinan dapat bertahan walaupun angka pengangguran turun. Penurunan pengangguran tentu penting dan positif, tetapi bila pekerjaan yang tersedia sebagian besar tetap rentan, maka stabilitas pendapatan rumah tangga tidak banyak membaik. Dalam situasi seperti itu, inflasi kecil saja dapat mendorong rumah tangga kembali menekan konsumsi gizi, pendidikan anak, atau biaya kesehatan preventif. Kemiskinan pun tidak hilang; ia hanya berpindah bentuk dari pengangguran terbuka menjadi pekerjaan rentan dengan kesejahteraan yang tetap rapuh. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Aspek layanan dasar membuat siklus ini lebih sulit diputus. Ketika rumah tangga miskin tidak memiliki sanitasi layak, akses air yang memadai, atau pendidikan yang cukup, biaya sosial jangka panjangnya jauh lebih besar daripada yang tampak pada pengeluaran bulanan. Anak yang sering sakit, kualitas belajar yang tertinggal, atau perjalanan ke sekolah yang lebih

mahal adalah bentuk-bentuk “inflasi sosial” yang tidak selalu tertangkap oleh IHK, tetapi sangat menentukan reproduksi kemiskinan. Karena itu, perdebatan inflasi yang terlalu sempit sering gagal memahami bahwa rumah tangga miskin menghadapi lebih dari satu jenis tekanan harga. Mereka menghadapi biaya hidup, biaya akses, dan biaya ketertinggalan secara bersamaan. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Membaca Indonesia 2025–Awal 2026

Jika dikaitkan dengan data Indonesia 2025–awal 2026, terlihat bahwa negara berada dalam posisi yang relatif lebih baik dibanding beberapa tahun lalu, tetapi masih menghadapi struktur kerentanan yang besar. Kemiskinan resmi turun ke 8,25 persen pada September 2025, inflasi Maret 2026 kembali ke 3,48 persen, dan TPT November 2025 turun ke 4,74 persen. Secara makro, ini adalah kombinasi yang cukup positif: harga relatif terkendali, pekerjaan bertambah, dan kemiskinan menurun. Namun struktur sosial-ekonominya memperlihatkan bahwa keberhasilan tersebut belum cukup kuat untuk menghapus kerentanan. BPS dan World Bank sama-sama menunjukkan masih besarnya lapisan rentan miskin dan kuatnya hubungan antara pekerjaan informal serta kualitas kerja dengan kemiskinan. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Indonesia juga memperlihatkan gejala dualisme yang khas. Di satu sisi, pertumbuhan cukup terjaga dan inflasi masih dalam kisaran sasaran BI. Di sisi lain, kesenjangan layanan dasar menurut kuintil pengeluaran tetap besar. Ini berarti sebagian rumah tangga menikmati stabilitas makro dengan bantalan pendidikan, tabungan, pekerjaan formal, dan akses layanan yang lebih kuat, sementara sebagian lain hidup dalam posisi yang sangat sensitif terhadap gangguan kecil. Dalam keadaan seperti itu, kebijakan antipoverty tidak bisa berhenti pada penciptaan pertumbuhan atau subsidi harga saja. Ia harus memeriksa siapa yang paling cepat kehilangan daya beli, siapa yang tetap berada di pekerjaan informal, dan

siapa yang masih tertinggal dalam pendidikan, sanitasi, atau kesehatan. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Implikasi Kebijakan

Implikasi pertama adalah bahwa pengendalian inflasi adalah kebijakan antikemiskinan. Ketika BI dan pemerintah menjaga inflasi tetap rendah dan stabil, mereka sesungguhnya sedang melindungi rumah tangga miskin dari erosi daya beli. Ini khususnya penting untuk pangan, transportasi, dan energi rumah tangga. Karena kelompok rentan miskin masih sangat besar, stabilitas harga harus dipandang sebagai perlindungan sosial universal paling dasar. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Implikasi kedua adalah bahwa penciptaan pekerjaan harus dibedakan dari peningkatan kualitas pekerjaan. Penurunan TPT memang penting, tetapi kebijakan pasar kerja harus diarahkan pada formalisasi, produktivitas, perlindungan sosial pekerja, dan akses keterampilan. Selama pekerjaan informal tetap dominan pada sektor berproduktivitas rendah, rumah tangga akan terus hidup dengan risiko tinggi. Agenda pengurangan kemiskinan karena itu harus terhubung dengan agenda transformasi pekerjaan, bukan hanya penciptaan lapangan kerja apa pun jenisnya. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Implikasi ketiga adalah bahwa layanan dasar harus diperlakukan sebagai investasi ekonomi, bukan sekadar pengeluaran sosial. Kesenjangan pendidikan, sanitasi, air minum, dan perlindungan kesehatan akan terus memproduksi ketimpangan produktivitas jika tidak diatasi. Data BPS tentang rata-rata lama sekolah, APK perguruan tinggi, dan sanitasi menurut kuintil menunjukkan bahwa rumah tangga miskin memasuki perlombaan ekonomi dengan titik start yang jauh lebih rendah. Maka kebijakan pengurangan kemiskinan harus secara eksplisit mengejar pemerataan kualitas layanan dasar. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Implikasi keempat adalah pentingnya pendekatan terpadu. Bantuan sosial tanpa stabilitas harga akan cepat tergerus inflasi. Stabilisasi harga tanpa perbaikan pekerjaan akan meninggalkan rumah tangga pada pendapatan yang tetap rapuh. Penciptaan pekerjaan tanpa pendidikan dan layanan dasar yang memadai akan melahirkan produktivitas yang rendah. Karena itu, kebijakan antipoverty yang efektif harus menggabungkan tiga hal sekaligus: stabilitas biaya hidup, peningkatan kualitas kerja, dan pemerataan layanan dasar. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Penutup

Makalah ini menegaskan bahwa hubungan kemiskinan dengan inflasi, pekerjaan informal, dan layanan dasar di Indonesia bersifat erat dan saling mengunci. Inflasi mengurangi daya beli rumah tangga miskin lebih cepat daripada kelompok atas. Pekerjaan informal membuat pendapatan rumah tangga lebih rentan, perlindungan kerja lebih lemah, dan mobilitas sosial lebih sempit. Keterbatasan layanan dasar, terutama pendidikan, sanitasi, air minum, dan perlindungan kesehatan, menurunkan kemampuan keluarga miskin untuk memutus transmisi kemiskinan ke generasi berikutnya. Dengan demikian, kemiskinan bukan sekadar kondisi kurang pendapatan, tetapi keadaan hidup dalam sistem kerentanan berlapis. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Data Indonesia 2025–awal 2026 menunjukkan bahwa negara telah membuat kemajuan: kemiskinan menurun, inflasi kembali ke kisaran sasaran, dan pengangguran menurun. Namun data yang sama juga menunjukkan bahwa pondasi kerentanannya masih kuat. Lapisan rentan miskin masih besar, pekerjaan informal masih dominan di banyak sektor dan kelompok, dan akses layanan dasar masih sangat ditentukan oleh posisi rumah tangga dalam distribusi pengeluaran. Artinya, pengurangan kemiskinan yang lebih dalam ke depan tidak cukup hanya dengan pertumbuhan ekonomi; ia memerlukan stabilitas harga yang lebih

konsisten, transformasi kualitas kerja, dan pemerataan layanan dasar yang nyata. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Pada akhirnya, rumah tangga miskin tidak membutuhkan satu kebijakan tunggal, tetapi lingkungan ekonomi yang membuat mereka tidak mudah jatuh: harga yang tidak liar, pekerjaan yang tidak rapuh, dan layanan dasar yang tidak timpang. Di situlah inti hubungan yang dibahas dalam makalah ini. Selama tiga hal tersebut belum diperkuat bersama-sama, kemiskinan mungkin turun secara statistik, tetapi kerentanannya akan tetap hidup di bawah permukaan. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Glosarium

Kemiskinan: kondisi ketika penduduk tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar minimum menurut ukuran yang ditetapkan. BPS mencatat persentase penduduk miskin Indonesia pada September 2025 sebesar 8,25 persen. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Rentan miskin: kelompok penduduk yang berada di atas garis kemiskinan tetapi mudah jatuh miskin ketika menghadapi guncangan ekonomi. BPS mencatat kelompok rentan miskin pada September 2024 sebesar 24,42 persen penduduk. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Inflasi: kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus. BI mencatat inflasi Indonesia 3,48 persen pada Maret 2026, setelah 4,76 persen pada Februari 2026. ([Bank Indonesia](#))

Pekerjaan informal: kegiatan bekerja yang umumnya tidak terlindungi penuh oleh kontrak kerja formal, jaminan sosial, dan standar hubungan kerja formal. World Bank menunjukkan informality di Indonesia terkonsentrasi pada pertanian dan jasa berkeahlian rendah serta

berasosiasi dengan kemiskinan yang lebih tinggi. ([Open Knowledge Repository](#))

Layanan dasar: layanan yang menjadi fondasi kesejahteraan, terutama pendidikan, kesehatan, air minum, sanitasi, dan perlindungan sosial kesehatan. BPS memantau 2025 layanan ini melalui tabel pendidikan, sanitasi, air minum layak, dan kepemilikan JKN. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Rata-rata lama sekolah: rata-rata jumlah tahun pendidikan formal yang telah dijalani penduduk umur 15 tahun ke atas. Pada 2025, kuintil pengeluaran terbawah 7,58 tahun dan kuintil tertinggi 11,76 tahun. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

APK Perguruan Tinggi: Angka Partisipasi Kasar pendidikan tinggi, yang menggambarkan partisipasi penduduk pada pendidikan tinggi. Pada 2025, APK PT kuintil 1 sebesar 17,30 dan kuintil 5 sebesar 55,37. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Sanitasi layak: akses rumah tangga terhadap fasilitas sanitasi yang memenuhi kriteria kelayakan. Pada 2025, akses sanitasi layak rumah tangga kuintil 1 sebesar 76,70 persen dan kuintil 5 sebesar 92,08 persen. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Referensi (APA 7)

Badan Pusat Statistik. (2025, 2 Mei). *Memahami perbedaan angka kemiskinan versi Bank Dunia dan BPS*. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Rudy C Tarumingkeng: Hubungan kemiskinan dengan inflasi, pekerjaan informal, dan layanan dasar

Badan Pusat Statistik. (2025, 5 November). *Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,85 persen. Rata-rata upah buruh sebesar 3,33 juta rupiah.* ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Badan Pusat Statistik. (2025, 12 Desember). *Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT) menurut kuintil pengeluaran, 2025.* ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Badan Pusat Statistik. (2025, 12 Desember). *Rata-rata lama sekolah penduduk umur 15 tahun ke atas menurut kuintil pengeluaran, 2025.* ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Badan Pusat Statistik. (2025, 16 Desember). *Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak menurut kuintil pengeluaran, 2025.* ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Badan Pusat Statistik. (2025, 16 Desember). *Persentase penduduk yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menurut provinsi, 2025.* ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Badan Pusat Statistik. (2025, 17 Desember). *Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum layak menurut provinsi dan klasifikasi desa, 2025.* ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Badan Pusat Statistik. (2026, 5 Februari). *November 2025: Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,74 persen dan rata-rata upah buruh sebesar 3,33 juta rupiah.* ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Badan Pusat Statistik. (2026, 5 Februari). *Persentase penduduk miskin September 2025 turun menjadi 8,25 persen.* ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Bank Indonesia. (2026). *Data inflasi.* ([Bank Indonesia](#))

Bank Indonesia. (2026, 1 April). *Inflasi IHK Maret 2026 tetap terjaga.* ([Bank Indonesia](#))

Rudy C Tarumingkeng: Hubungan kemiskinan dengan inflasi, pekerjaan informal, dan layanan dasar

World Bank. (2023). *Informality in Indonesia: Levels, trends, and policy implications*. ([Open Knowledge Repository](#))

World Bank. (2025). *Indonesia Economic Prospects, June 2025: A roadmap from homes to jobs to prosperity in Indonesia*. ([Open Knowledge Repository](#))

World Bank. (2025, October). *Poverty & Equity Brief: Indonesia*. ([World Bank](#))

World Bank. (2026). *Reforms for a formal and prosperous Indonesia*. ([World Bank](#))

World Bank. (2020). *The Promise of Education in Indonesia*. ([World Bank](#))

Copilot for this article: ChatGPT 5.4. Thinking (2026). Access date: 7 April 2026. Author's account ([Rudy C Tarumingkeng](#))

<https://chatgpt.com/c/69d4b1d7-91a0-839b-8cb9-b5d86c596a23>